

Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu



LKJIP BKPSDM 2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2025**



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2025 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mahakam Ulu**



**Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mahakam Ulu**

Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Bagun

Website :

www.bkpsdmmahakamulu.com E-mail

: bkpsdm@mahakamulukab.go.id

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Ujoh bilang, 2 Januari 2026
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Nobertus Ngande, S.Ip
Pembina Utama Muda (IV/b)
NIP. 198411282010011012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
1. Latar Belakang	
2. Susunan Organisasi	1
3. Tugas pokok dan fungsi.....	2
4. Sumber Daya Aparatur	3
5. Sumber Daya Keuangan.....	5
B. Permasalahan utama (Strategic Issue).....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	7
1. Visi	7
2. Misi	7
3. Tujuan dan Sasaran Startegis	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	25
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
3. Analisis Capaian Kinerja	36
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan	42
5. Kendala dan Solusi	48
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. LATAR BELAKANG

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada awalnya adalah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, namun karena dirasa beban kerja pengelolaan pegawai di daerah Kab. Mahakam Ulu semakin berat dan luas, maka dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mahakam Ulu, terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian.

Sedangkan Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2026 berfokus pada transformasi digital dan penguatan kualitas SDM aparatur guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berikut adalah beberapa isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu

1. Penerapan Manajemen Talenta dan Meritokrasi: Transisi dari administrasi kepegawaian konvensional menuju sistem manajemen talenta yang menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi.
2. Digitalisasi dan Transformasi Manajemen ASN: Akselerasi penggunaan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (Smart ASN) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akurasi

data.

3. Penguatan Integritas dan Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK): Mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas guna mendukung misi pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan bebas korupsi.
4. Optimalisasi Pengembangan Kompetensi: Peningkatan keterampilan teknis, manajerial, dan fungsional melalui sertifikasi serta pelatihan yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
5. Penataan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional: Penyesuaian struktur organisasi serta optimalisasi peran jabatan fungsional untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.

Isu-isu ini disusun untuk menjawab tantangan dinamika lingkungan global dan nasional agar birokrasi lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu No.4 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

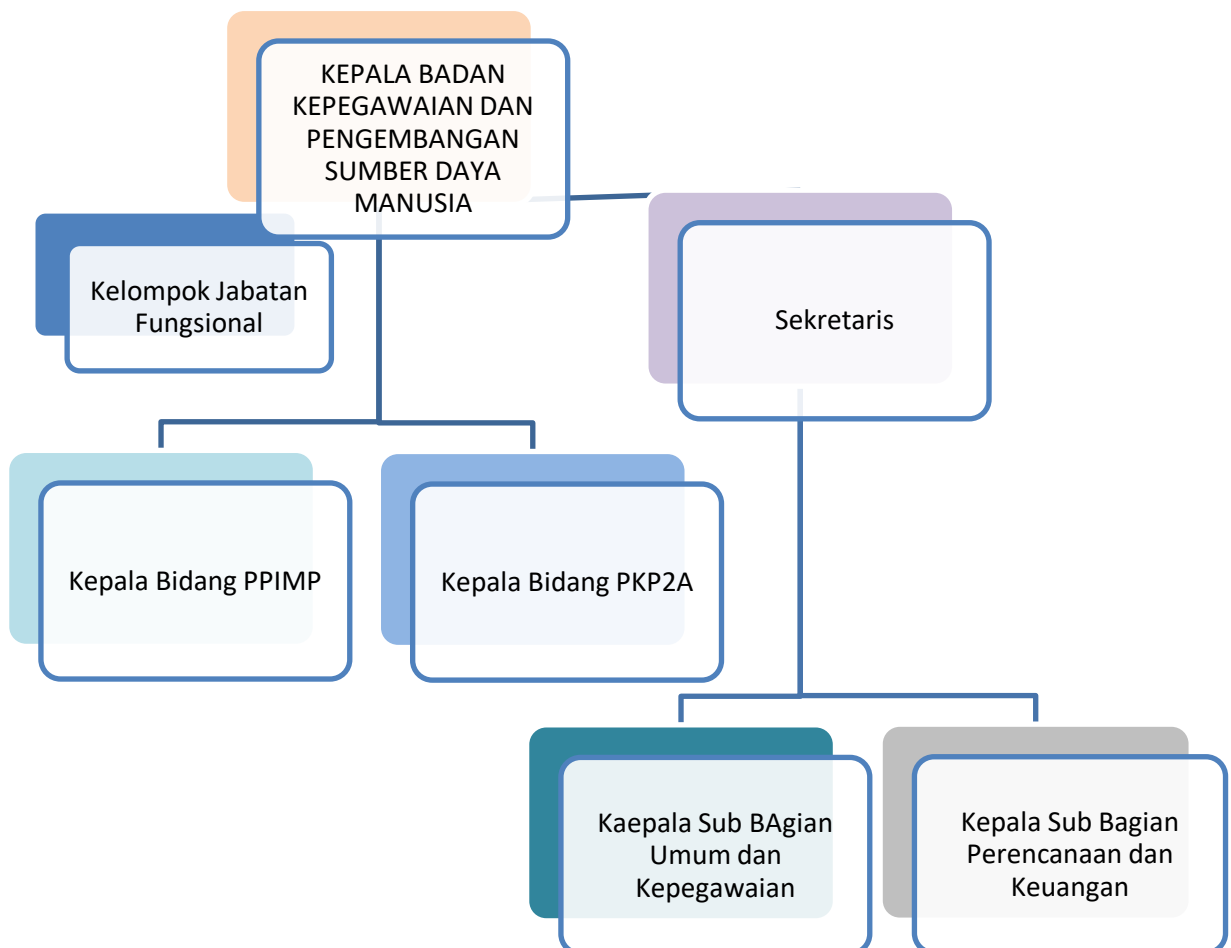
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- ◆ Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pengembangan sumber daya manusia;
- ◆ Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur
- ◆ Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi aparatur
- ◆ Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur
- ◆ Pelaksanaan administrasi BKPSDM dan
- ◆ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM.
- ◆ Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur

organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu. Berikut bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Mahakam Ulu



Sumber : SOTK BKPSDM No. 4 Tahun 2021

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu BKPSDM yang mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu dimana mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tugas pembantuan.

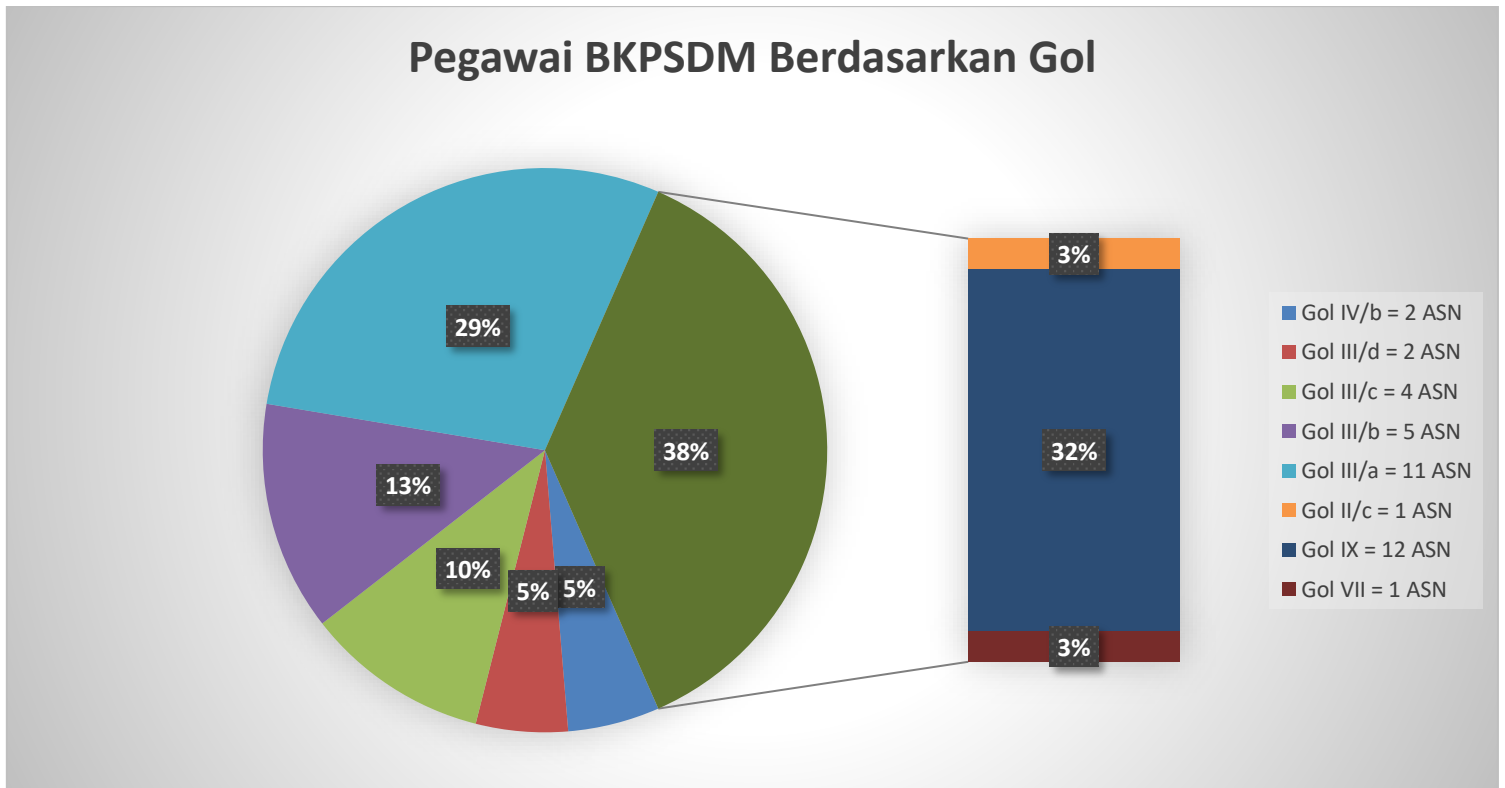
Fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian;
- c. Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- d. Menetapkan kebijakan dalam rangka penataan dalam jabatan, pengembangan karier dan pemindahan aparatur sipil negara;
- e. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan kenaikan pangkat struktural dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil;
- f. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengadaan, pembinaan dan pemberhentian aparatur sipil negara;
- g. Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan fasilitas aparatur sipil negara; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

4. SUMBER DAYA APARATUR

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program kegiatan yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia aparatur yang tersedia. Pada Tahun 2025 , BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu didukung oleh 57 orang personil yang terdiri dari 40 ASN (PNS dan PPPK) dan 17 Tenaga Non ASN. Gambaran dukungan sumber daya manusia dapat dilihat pada Gambar infografis berikut :

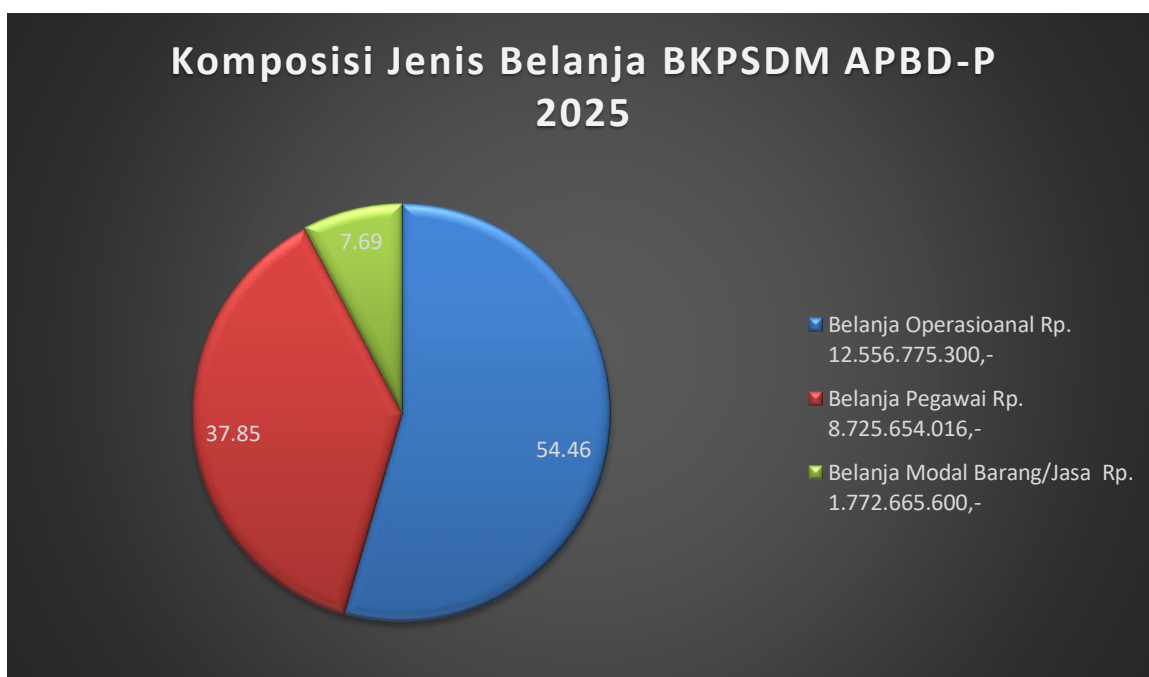
Gambar 1.2
Infografis Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu



5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Pagu anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun tidak terlalu signifikan. Distribusi anggaran pada BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu pada APBD-P Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar dibawah :

Gambar 1.3
Distribusi Anggaran per Kegiatan



Pagu SKPD	23.055.094.916,-
Belanja Operasional	12.556.775.300,-
Belanja Pegawai	8.725.654.016,-
Belanja Modal	1.772.665.600,-



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Didalam dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah yaitu RENSTRA BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu dan dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu, BKPSDM mendukung visi dan misi Bupati periode 2021-2025 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”. Operasionalisasi misi tersebut tertuang dalam sasaran strategis dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, sasaran strategis yang menjadi isu dalam pelaksanaan tugas BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

1. bagaimana meningkatkan kualifikasi pendidikan;
2. bagaimana meningkatkan disiplin aparatur;
3. bagaimana meningkatkan kinerja aparatur;
4. bagaimana meningkatkan pemenuhan standar kompetensi, dan;
5. bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian, jika sasaran strategis tersebut dapat dicapai diharapkan akan menghasilkan ASN yang profesional.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

- a. BKPSDM memerlukan tambahan staf programer yang diharapkan mampu merespon cepatnya perubahan peraturan sehingga digitalisasi pelayanan kepegawaian dapat berjalan dengan cepat;
- b. BKPSDM tidak memiliki gedung atau laboratorium komputer untuk pelaksanaan Seleksi CAT;
- c. Penerapan kebijakan Pola Karir belum menggunakan hasil dari manajemen talenta;



Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Pelatihan Administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Pelaksanaan Administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu adalah tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu:



**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2025	2026	2026
1	Tujuan: Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional Indikator Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	-	-	-	88,00%	90,00%	95,00%
		Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	-	-	-	81,00%	85,00%	90,00%
		Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	-	-	-	75,00%	80,00%	85,00%
		Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	-	-	-	87,00%	90,00%	95,00%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	-	-	60,00%	65,00%	68,00%
		Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	-	-	-	90,00%	95,00%	98,00%

Sumber : Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
I	Tujuan: Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional	Indikator Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN				



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Sa tu an	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	1.1	Persentase Dimensi Kualifikasi ASN	%	Persentase Dimensi Kualifikasi ASN merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja seorang ASN. Dimensi ini mencakup berbagai faktor, seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, serta sertifikasi dan pelatihan yang relevan. Penilaian kualifikasi yang dilakukan secara tepat akan memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya	Persentase Dimensi Kualifikasi ASN = (Jumlah ASN Mahakam Ulu dengan bobot nilai dimensi kualifikasi 10 Keatas / Jumlah ASN Mahakam Ulu)* 100%	IKU BKPSDM
2	Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	2.1	Persentase dimensi kompetensi ASN	%	Persentase dimensi kompetensi ASN merupakan indikator yang mengukur seberapa besar jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN melalui kegiatan pelatihan & pendidikan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional maupun Jabatan Pelaksana	Persentase dimensi kompetensi ASN = (Jumlah ASN Mahakam Ulu dengan bobot nilai dimensi kompetensi 10 Keatas / Jumlah ASN Mahakam Ulu)* 100%	IKU BKPSDM
3	Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	3.1	Persentase dimensi kinerja ASN	%	Persentase dimensi kinerja ASN merupakan indikator yang mengukur seberapa besar peningkatan dimensi kerja ASN melalui pelaporan kinerja pegawai secara sistematis untuk menilai sejauh mana ASN dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Persentase dimensi kinerja ASN = (Jumlah ASN Mahakam Ulu dengan bobot nilai dimensi kinerja 25 Keatas / Jumlah ASN Mahakam Ulu)* 100%	IKU BKPSDM



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Sa tu an	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
4	Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	4.1	Persentase dimensi disiplin ASN	%	Persentase dimensi disiplin ASN merupakan indikator yang mengukur kedisiplinan ASN mencakup kehadiran tepat waktu, pemenuhan tugas sesuai kewajiban, pengelolaan waktu yang efektif, kepatuhan terhadap aturan dan etika, pelaksanaan instruksi dengan baik, ketertiban dalam administrasi.	Persentase dimensi disiplin ASN = (Jumlah ASN Mahakam Ulu dengan bobot nilai dimensi disiplin 5 Keatas / Jumlah ASN Mahakam Ulu)* 100%	IKU BKPSDM
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5.1	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	Nilai	Nilai evaluasi implementasi SAKIP menunjukkan seberapa baik suatu instansi pemerintah dalam mengelola kinerjanya, dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi. Penilaian ini membantu instansi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja.	Penilaian dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu yang melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	LHE SAKIP
6	Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	6.1	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	%	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran merupakan indikator yang menunjukkan seberapa baik suatu instansi dalam mengelola kegiatan administratif dan operasional yang mendukung kelancaran perkantoran. Evaluasi terhadap pemenuhan pelayanan ini melibatkan beberapa aspek, termasuk pengelolaan dokumen, fasilitas perkantoran.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran = (Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi & operasional yang terpenuhi/ jumlah pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang direncanakan)*100%	IKU BKPSDM

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	%.	88,00
		Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	%.	81,00
		Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	%.	75,00
		Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	%.	87,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	%.	60,00
		Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	%.	90,00

Sumber : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana



yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional	Presentase Dimensi Kualifikasi ASN	88,00 %
		Presentase Dimensi Kompetensi ASN	81,00 %
		Presentase Dimensi Kinerja ASN	75,00 %
		Presentase Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	87,00
		Presentase Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	60,00 %
		Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran	90,00 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja



dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		-
	KEPEGAWAIAN		-
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
I.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	40 Orang/bulan
I.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	14 Orang/bulan
I.1.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan pembayaran Honor dan THR Tenaga Non PNS	12 Laporan
I.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen
I.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen
I.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen



I.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Laporan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan
I.3.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
I.3.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pengelolaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 SK 5 Dokumen 250 Orang
I.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan I,II,III JFT/JFU, SK Peninjauan Masa Kerja, SK Pencantuman Gelar, SK KGB	150 SK
I.3.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen
I.3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Sertifikat Peserta Sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	250 Orang
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Kebutuhan Operasional Kantor	8 Paket 2 Laporan 1 Dokumen
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC	1 Paket
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
I.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	3 Paket
I.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket
I.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu	1 Laporan
I.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
I.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Penunjang Operasional Kantor	312 Unit
I.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	312 Unit



I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor	13 Laporan
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian Materai	1 Laporan
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan dan Prasarana Penunjang Operasional Perkantoran	24 Unit
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit
II	Program Kepegawaian Daerah		
II.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Administrasi dan Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1 Kegiatan 5 Dokumen
II.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN	1 Dokumen
II.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
II.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen
II.1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Kegiatan
II.1.5	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen
II.1.6	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen



II.2	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Administrasi dan Pengelolaan Mutasi dan Promosi sesuai kebutuhan	10 Dokumen 100 SK 3 Dokumen
II.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	10 Dokumen
II.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Golongan IVa dan IVb	100 SK
II.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen
II.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Kab. Mahakam Ulu	1 Dokumen 2 Laporan 30 SK 50 Orang
II.3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang
II.3.2	Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen
II.3.3	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	30 SK
II.3.4	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional	2 Laporan
II.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Administrasi dan Pembinaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Dokumen 105 Sertifikat 1153 SKP 20 Orang 5 Laporan
II.4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
II.4.2	Pelaksanaan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	105 Sertifikat
II.4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1153 SKP
II.4.4	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	10 Orang
II.4.5	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang



II.4.6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	5 Laporan
II.4.7	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		-
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
III.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan dan Kebutuhan	18 Orang
III.1.1	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	18 Orang

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025



Uraian Belanja BKPSDM APBD-P TA 2025

Kode Urusan	Uraian	Anggaran
1	2	3
	BELANJA PEGAWAI	
5.03.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.725.654.016
5.03.01.2.02.0002	Jumlah Orang yang menerima Honor Pengelola Keuangan SKPD	353.610.000
5.03.01.2.08.0004	Tersedianya Laporan Honor dan THR Tenaga Non PNS	1.172.949.300
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.764.000
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.032.600
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.948.200
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.803.200
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.980.000
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.265.900
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.265.900
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.204.350
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	122.769.000
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74.435.350
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.636.255.500
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.047.500
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	322.589.200
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.428.900
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.731.100
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.119.800
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.046.339.000
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	105.000.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.902.000
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.902.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.255.949.300
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.500.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.369.350
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.969.350
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.400.000
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.759.186.900
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	105.969.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.071.240.400
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	117.933.500
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	312.565.000
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	105.419.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	46.060.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	684.334.300
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	35.027.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	387.179.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	262.128.300
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	4.862.690.700



5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	57.036.700
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.275.896.000
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	637.858.000
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.719.934.000
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	126.811.000
5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	45.155.000
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	781.749.900
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	59.137.200
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	151.291.000
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77.088.800
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	111.450.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	87.119.900
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	174.657.000
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	121.006.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.262.158.700
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.262.158.700



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	88,00 %	83,55 %	94,95 %	Sangat Tinggi	BKPSDM
	Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	81,00 %	72,72 %	89,78 %	Tinggi	BKPSDM
	Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	75,00 %	78,57 %	100 %	Sangat Tinggi	BKPSDM
	Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	87,00 %	99,91	100 %	Sangat Tinggi	BKPSDM



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	60,00 (B)	60,90 (B)	96,50 %	Sangat Tinggi	LHE SAKIP
	Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	90,00 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi	BKPSDM

Sumber : DATA BKPSDM

Uraian penjelasan tabel :

1. Indikator Kinerja Persentase dimensi kualifikasi ASN

Realisasi indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Namun, capaian tersebut masih tergolong dalam kategori *sangat tinggi*. Berdasarkan data pendidikan PNS Kabupaten Mahakam Ulu, terdapat:

SLTA Kejuruan	33
SLTA	259
S-3/Doktor	1
S-2	150
S-1/Sarjana	1113
Diploma IV	33
Diploma III/Sarjana Muda	270
Diploma I	1
Diploma II	4
Profesi	97

Dengan demikian, jumlah PNS Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (minimal D-III ke atas) mencapai 1297 Orang dari total ASN Kabupaten Mahakam Ulu 1961 Orang

2. Indikator Kinerja Persentase dimensi kompetensi ASN

Realisasi indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Namun, capaian yang ada masih termasuk dalam kategori *tinggi*. Berdasarkan data PNS Kabupaten Mahakam Ulu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), diperoleh rincian sebagai berikut:

- Diklat Kepemimpinan telah diikuti oleh 197 orang PNS



jabatan struktural, sementara 33 orang belum mengikuti.

- Diklat Fungsional telah diikuti oleh orang PNS pada jabatan fungsional, dan orang belum mengikuti.



- Diklat Teknis telah diikuti oleh 600 orang, sedangkan 468 orang lainnya belum mengikuti.

Secara keseluruhan, jumlah PNS Kabupaten Mahakam Ulu yang telah mengikuti minimal satu jenis diklat (Kepemimpinan, Fungsional, atau Teknis) adalah sebanyak 72,72% dari total 1.961 ASN

3. Indikator Kinerja Persentase dimensi kinerja ASN

Realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian yang masuk dalam kategori *sangat tinggi*. Berdasarkan data rekapitulasi Penilaian SKP melalui aplikasi e-Kinerja BKN Tahun 2025, berikut adalah hasil penilaian terhadap PNS Kabupaten Mahakam Ulu:

- Sangat Baik (nilai 91–100): 508 orang
- Baik (nilai 76–90): 328 orang
- Cukup (nilai 61–75): 0 orang
- Kurang (nilai 51–60): 0 orang
- Buruk (nilai di bawah 50): 1 orang

Dengan demikian, jumlah PNS yang memperoleh penilaian Baik dan Sangat Baik mencapai 1.297 orang dari total 1.961 ASN, mencerminkan tingkat kinerja yang sangat memuaskan secara keseluruhan.

4. Indikator Kinerja Persentase dimensi disiplin ASN

Realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2025 mengenai pelanggaran disiplin, tercatat hanya 1 orang PNS Kabupaten Mahakam Ulu yang menerima Hukuman Disiplin Ringan, sementara 1.961 orang lainnya tidak pernah menerima hukuman disiplin.

Dengan demikian, persentase PNS yang tidak pernah dikenai hukuman disiplin mencapai 99,91% dari total 1.961 PNS

5. Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP

Realisasi indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 60,00. Berdasarkan hasil evaluasi yang



dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu, nilai implementasi SAKIP yang berhasil dicapai adalah 62,50 (B).

Meskipun belum memenuhi target, capaian tersebut tetap berada dalam kategori sangat tinggi, yang mencerminkan komitmen terhadap penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

6. Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran

Realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian yang masuk dalam kategori *sangat tinggi dalam Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran*.

1.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan: Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional								
1	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	NA	NA	NA	88,00 %	83,55 %	94,95 %
2	Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	NA	NA	NA	81,00 %	72,72 %	89,78 %
3	Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	NA	NA	NA	75,00 %	78,57 %	100 %
4	Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	NA	NA	NA	87,00 %	99,91	100 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	NA	NA	NA	60,00 (B)	62,50 (B)	96,50 %



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	NA	NA	NA	90,00 %	100 %	100 %

Uraian penjelasan tabel :

Merunut pada Sasaran Strategis dalam Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional, BKPSDM memfokuskan pada peningkatan Profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. BKPSDM menggunakan dimensi Indeks Profesionalisme ASN sebagai indikator pada sasaran strategis ini. Yakni:

- 1) Dimensi Kualifikasi
- 2) Dimensi Kompetensi
- 3) Dimensi Kinerja
- 4) Dimensi Disiplin, Selain itu disertai dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam Pelayanan dan Administrasi Operasional Perkantoran yaitu:
- 5) Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP
- 6) Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran

Indikator Kinerja tersebut diatas baru ditetapkan di Tahun 2024 pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM tahun 2021-2026, untuk itu penghitungan mandiri terhadap capaian Tujuan dan Sasaran Strategis baru dilakukan pada tahun 2025, sehingga capaian kinerja tahun sebelumnya belum diketahui (belum dilakukan).



1.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Perubahan Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Tujuan: Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional				
1	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	83,55 %	95,00%	93,21 %
2	Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	72,72 %	90,00%	80,80 %
3	Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	78,57 %	85,00%	92,43 %
4	Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	99,91	95,00%	>100 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	57,90 (CC)	68,00	85,14 %
6	Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	100 %	98,00%	>100 %

Sumber : RENSTRA BKPSDM

Uraian penjelasan tabel :

Pada Realisasi Kinerja di tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir rencana Strategis mengalami Tingkat Kemajuan yang cukup tinggi, dengan didukung pemenuhan administrasi baik dokumen dan data serta pelayanan manajemen yang memadai dalam proses pelaporan.



1.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capai an	Analisis Keberhasilan/Ke gagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan: Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional							
1	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	88,00 %	83,55 %	94,95 %	Terdapat beberapa PNS yang tidak membuat sk Ijin belajar terlebih dahulu sebelum kuliah	
2	Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	81,00 %	72,72 %	89,78 %	Belum sinkronnya data kepegawaian	Sinkronisasi data kepegawaian
3	Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	75,00 %	78,57 %	100 %	Sistem digital SKP telah di implementasikan, meskipun perlu peningkatan dalam penggunaan oleh seluruh pegawai	Sosialisasi penggunaan Sistem digital SKP
4	Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	87,00 %	99,91	100 %	durasi waktu yang cukup lama dalam mendapatkan evidence atau bukti - bukti kelengkapan berkas perkara	jemput bola ke instansi terkait untuk mendapatkan evidence atau bukti - bukti
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	60,00 (B)	57,90 (CC)	96,50 %	dokumen perencanaan tidak sinkron (Renstra, Renja, IKU, PK, dan LKJIP)	Menyinkronkan dokumen perencanaan
6	Meningkatnya Pelayanan Dan	Persentase Pemenuhan Pelayanan	90,00 %	100 %	100 %		



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capai an	Analisis Keberhasilan/Ke gagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Administrasi Operasional Perkantoran	Administrasi Dan Operasional Perkantoran					

Sumber : Data BKPSDM

1.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Di isi dengan data efisiensi kegiatan latsar yg di Akomodir
BPSDM Provinsi

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisa si	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan: Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional							
1	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	88,00 %	83,55 %	94,95 %	1.109.170.400	952.769.016	85,90	
2	Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	81,00 %	72,72 %	89,78 %	2.409.272.125	2.281.568.657	94,70	
3	Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	75,00 %	78,57 %	100 %	1.192.385.900	1.139.415.400	95,56	
4	Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	87,00 %	99,91	100 %	558.523.200	553.978.236	99,19	



Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu

5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	60,00 (B)	62,50 (B)	96,50 %	7.224.142.584	6.288.366.081	87,05	
---	---	-----------	-----------	---------	---------------	---------------	-------	--



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	90,00 %	100 %	100 %	2.764.567.100	2.597.537.324	93,96	

Sumber : BKPSDM 2025

Berdasarkan tabel 3.7 di atas capaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran BKPSDM masih belum melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran dari total belanja langsung program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran

1.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan: Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional								
1	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	94,95	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan			
				Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi ASN Jumlah PNS Promosi dan BAPERJAKAT / Tim Penilai Kinerja PNS	85,90	Menunjang	
2	Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	89,78	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan			



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					dan pelatihan struktural (PNS)			
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	94,70	Menunjang	
3	Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	100	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi			
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penginputan Aplikasi E-Kinerja, dan Verifikasi TPP	95,56	Menunjang	
4	Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	100	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SK Hukuman Disiplin ASN SKP Pegawai ASN, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Rapat Evaluasi Kinerja ASN	99,19	Menunjang	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	96,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Ikhtisar Jumlah Penyesunan Perubahan RKA SKPD Jumlah Penyusunan RENJA/RENS TRA	87,05	Menunjang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semester	93,96	Menunjang	
6	Meningkatnya Pelayanan Dan	Persentase Pemenuha	100	PROGRAM PENUNJANG	Jumlah dokumen			



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Administrasi Operasional Perkantoran	n Pelayanan Administra si Dan Operasiona l Perkantora n		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembelian ATK Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,56	Menunjang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	99,19	Menunjang	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	87,05	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga Non PNS	93,96	Menunjang	

Sumber : Data BKPSDM

Program / kegiatan menunjang dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja ialah Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang yang menggambarkan capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu

1.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber



daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.222.298.084	10.708.562.441	87,61
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	494.120.400	492.533.700	99,68
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.730.022.184	5.795.832.381	86,12
1.4.2.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	558.523.200	553.978.236	99,19
1.4.2.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.455.151.100	2.408.738.224	98,11
1.4.2.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.865.400	6.842.500	99,67
1.4.2.1.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.550.600	181.956.600	60,14
1.4.2.1.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.675.065.200	1.161.043.800	69,31
1.4.2.1.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.087.916.325	6.747.264.713	95,19
1.4.2.1.2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.377.087.900	2.373.511.640	99,85
1.4.2.1.2.2	Mutasi dan Promosi ASN	1.109.170.400	952.769.016	85,90
1.4.2.1.2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	2.409.272.125	2.281.568.657	94,70
1.4.2.1.2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.192.385.900	1.139.415.400	95,56
1.4.2.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.020.418.640	1.807.125.800	89,44
1.4.2.1.3.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.020.418.640	1.807.125.800	89,44

Sumber : Realisasi Fisik BKPSDM TW IV TA 2025



Uraian penjelasan tabel:

Program penunjang urusan pemerintahan daerah menunjukkan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai 87,61% dari target yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pada komponen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meskipun alokasi anggarannya relatif kecil, namun kinerja yang dicapai sangat tinggi, yakni 99,68%. Hal ini menunjukkan efektivitas pemanfaatan anggaran yang sangat baik.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki anggaran yang lebih besar dibanding sebelumnya, namun hanya mampu mencapai kinerja 86,12%, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran masih dapat ditingkatkan untuk hasil yang lebih optimal.

Sementara itu, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah juga menyerap anggaran cukup besar dengan capaian kinerja 99,19%. Meski tinggi, masih terdapat ruang perbaikan agar penggunaan anggaran dapat sepenuhnya optimal.

Untuk Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran yang besar diimbangi dengan kinerja 98,11%, mencerminkan bahwa penggunaan dana pada program ini sudah sangat efektif dan tepat sasaran.

Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah walaupun hanya memperoleh anggaran yang kecil, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu 99,67%, menandakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.



Namun, untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah, meskipun anggarannya tergolong sangat besar, pencapaian kinerjanya hanya 60,14%. Ini menunjukkan masih rendahnya efisiensi dalam pemanfaatan dana pada kegiatan tersebut.

Hal serupa terjadi pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang meski didukung anggaran sangat besar, hanya mencapai kinerja 69,31%. Ini menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran pada program ini masih perlu diperbaiki secara signifikan.

Program Kepegawaian Daerah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dengan serapan anggaran mencapai 95,19%, menandakan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara baik dan mendukung pelaksanaan urusan kepegawaian secara efektif.

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN mendapat porsi anggaran yang besar dan mampu mencapai kinerja 99,85%, sebuah capaian yang menunjukkan optimalisasi anggaran yang sangat baik.

Untuk Mutasi dan Promosi ASN, dengan dukungan anggaran yang besar, kinerja yang dicapai 85,90%. Angka ini mengindikasikan bahwa anggaran telah dimanfaatkan dengan cukup optimal, meskipun masih terdapat ruang perbaikan.

Program Pengembangan Kompetensi ASN juga mencatat pencapaian kinerja yang memuaskan sebesar 94,70%, seiring dengan anggaran yang besar, menunjukkan bahwa investasi pada peningkatan kapasitas ASN telah dilakukan dengan tepat.



Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mencatat capaian 95,56%, yang merefleksikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien dan mendukung kinerja pegawai secara menyeluruh.

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, alokasi anggaran sebesar 89,44% mencerminkan komitmen daerah terhadap peningkatan kualitas SDM, yang juga tercermin pada kinerja sebesar 89,44% dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berada pada tingkat efisiensi yang cukup baik



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *Good Governance*. Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja instansi.

Melalui laporan ini, dapat tergambar capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang tahun 2025. Laporan tidak hanya memuat keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap capaian sasaran strategis, termasuk analisis atas faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pencapaian tersebut. Dengan demikian, laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan rujukan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun hasil utama dari pelaksanaan kinerja BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, seluruhnya berhasil dicapai (100%). Tidak terdapat sasaran strategis yang tidak tercapai.
2. Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja, antara lain:



- Perubahan regulasi terkait pengembangan kompetensi ASN;
- Keterbatasan alokasi anggaran;
- Minimnya fasilitas pendukung; serta
- Masih rendahnya partisipasi ASN dalam mengikuti program peningkatan kompetensi.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan, berikut beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu:

1. Melakukan pengusulan anggaran secara lebih terstruktur pada tahapan RKPD di tahun sebelumnya (n-1);
2. Melakukan perhitungan efisiensi anggaran kegiatan tanpa mengurangi capaian indikator output yang telah ditetapkan;
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut terhadap rekomendasi sebagai bagian dari komitmen perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Selain itu, laporan ini juga menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat serta seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi aktif dalam membangun Kabupaten Mahakam Ulu ke arah yang lebih baik

Ujoh Bilang, 28 Februari 2026

Plt. Kepala Badan Kepegawaian,

Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nobertus Ngande, SIP
NIP. 198411282010011012



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Poros Polres-Tikah Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun
UJOH BILANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Bonifasius Belawan Geh, SH**

Jabatan : Bupati Mahakam Ulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ujoh Bilang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Bonifasius Belawan Geh, SH., ME

Pihak Pertama,

Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MAHAKAM ULU


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional	Presentase Dimensi Kualifikasi ASN	90,00 %
		Presentase Dimensi Kompetensi ASN	85,00%
		Presentase Dimensi Kinerja ASN	80,00%
		Presentase Dimensi Disiplin ASN	90,00 %
		Presentase Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	65,00%
		Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran	95,00%

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.440.406.666
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 8.001.379.700
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 319.994.900

Ujoh Bilang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. Bonifasius Belawan Geh, SH., ME

Pihak Pertama,

Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si



Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output) Perubahan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian pada tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				2021		2022		RKPD 2023		2025		2026		2026	
				CAPAIAN	Rp	CAPAIAN	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia														
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 03	Kepegawaian		-	Rp 12.997.131.600	-	Rp 19.869.227.676	-	Rp 19.087.420.263		Rp 17.020.441.863		Rp 17.274.108.743		Rp 16.101.036.523	
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	-	Rp 9.031.273.000	Terlaksananya Penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah	Rp 15.764.625.576	Terlaksananya Penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah	Rp 8.718.919.063	Terlaksananya Penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah	Rp 9.204.891.063	Terlaksananya Penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah	Rp 9.058.420.063	Terlaksananya Penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat Daerah	Rp 9.096.707.563	
5 03 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan	3 Dokumen dan 1 Laporan	Rp 26.253.000	3 Dokumen dan 1 Laporan	Rp 6.060.629.038	3 Dokumen dan 1 Laporan	Rp 427.937.200	3 Dokumen dan 1 Laporan	Rp 123.693.400	3 Dokumen dan 1 Laporan	Rp 123.693.400	3 Dokumen dan 1 Laporan	Rp 123.693.400	





5	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8.935.100	1 Dokumen	Rp 6.787.900	1 Dokumen	Rp 46.787.900	1 Dokumen	Rp 46.787.900
5	03	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10386000	1 Dokumen	10.753.200	1 Dokumen	Rp 10.390.500	1 Dokumen	Rp 10.390.500	1 Dokumen	Rp 10.390.500
5	03	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9780800	1 Dokumen	7.763.600	1 Dokumen	Rp 202.067.600	1 Dokumen	Rp 9.779.800	1 Dokumen	Rp 9.779.800
5	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.086.200,00	1 Laporan	6.033.177.138	1 Laporan	Rp 208.691.200	1 Laporan	Rp 56.735.200	1 Laporan	Rp 56.735.200
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun	12 Dokumen, 3 Laporan, 30 Orang ASN, dan 1 Kegiatan	12 Dokumen, 3 Laporan, 30 Orang ASN, dan 1 Kegiatan	Rp 5.643.889.092	12 Dokumen, 3 Laporan, 30 Orang ASN, dan 1 Kegiatan	Rp 6.033.177.138	12 Dokumen, 3 Laporan, 30 Orang ASN, dan 1 Kegiatan	Rp 4.960.230.663	12 Dokumen, 3 Laporan, 30 Orang ASN, dan 1 Kegiatan	Rp 5.010.848.663	12 Dokumen, 3 Laporan, 30 Orang ASN, dan 1 Kegiatan	Rp 5.010.848.663
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	5411563992	30 Orang/Bulan	5.733.313.938	30 Orang/Bulan	Rp 4.659.355.463	30 Orang/Bulan	Rp 4.659.355.463	30 Orang/Bulan	Rp 4.659.355.463
5	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	215412800	12 Dokumen	283.440.000	12 Dokumen	Rp 283.440.000	12 Dokumen	Rp 283.440.000	12 Dokumen	Rp 283.440.000
5	03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7128200	1 Laporan	7.541.700	1 Laporan	Rp 7.482.000	1 Laporan	Rp 7.448.000	1 Laporan	Rp 7.448.000
5	03	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9784100	2 Laporan	8.881.500	2 Laporan	Rp 9.953.200	2 Laporan	Rp 60.605.200	2 Laporan	Rp 60.605.200





5	03	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) SK Penambahan Masa Kerja (PMK) Jumlah Kecamatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Sertifikat kegiatan Sosialisasi	451 Dokumen SK & 5 Laporan	451 Dokumen SK & 5 Laporan	227.036.300	451 Dokumen SK & 5 Laporan	286.279.600	Rp 462.091.700	451 Dokumen SK & 5 Laporan	Rp 341.729.200	451 Dokumen SK & 5 Laporan	Rp 359.338.200	451 Dokumen SK & 5 Laporan	Rp 372.625.700		
5	03	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Golongan I,II,III JFT/JFU, SK Peninjauan Masa Kerja, SK Pencantuman Gelar, SK KGB	250 SK	250 SK	53502000	250 SK	138.677.000	250 SK	41.468.000	300 SK	55.250.000	320 SK	63.537.500	350 SK	71.825.000
5	03	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						1 Kegiatan	62.267.000							
5	03	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	123531800	1 Dokumen	122.288.600	1 Dokumen	Rp 131.086.700	1 Dokumen	Rp 135.800.700	1 Dokumen	Rp 135.800.700	1 Dokumen	Rp 135.800.700
5	03	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Sertifikat Peserta Sosialisasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Laporan dan 200 Dokumen	5 Laporan dan 200 Dokumen	50002500	5 Laporan dan 200 Dokumen	25.314.000	5 Laporan dan 200 Dokumen	Rp 227.270.000	5 Laporan dan 230 Dokumen	Rp 150.678.500	5 Laporan dan 250 Dokumen	Rp 160.000.000	5 Laporan dan 300 Dokumen	Rp 165.000.000
5	03	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pembelian ATK Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu Jumlah Pelaksanaan Rapat SKPD Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Korpri Jumlah Koordinasi ke Korpri Provinsi dan Pusat	12 Perawatan15 Buah4 paket1000 Map55 Dus4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	12 Perawatan15 Buah4 paket1000 Map55 Dus4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	553.978.100	12 Perawatan15 Buah4 paket1000 Map55 Dus4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	718.324.800	12 Perawatan15 Buah4 paket1000 Map55 Dus4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	753.799.500	12 Perawatan15 Buah4 paket1000 Map55 Dus4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	1.007.404.800	12 Perawatan15 Buah4 paket1000 Map55 Dus4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	793.324.800	12 Perawatan15 Buah4 paket1000 Map55 Dus4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	793.324.800	
5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC	12 Perawatan	12 Perawatan	17.998.300	12 Perawatan	25.000.000	12 Perawatan	4.997.200	12 Perawatan	25.000.000	12 Perawatan	25.000.000	12 Perawatan	25.000.000
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Buah	15 Buah	107.806.500	15 Buah	107.806.500	15 Buah	282.945.900	1 Paket	107.806.500	1 Paket	107.806.500	1 Paket	107.806.500
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	4 paket	4 paket	85.518.300	4 paket	85.518.300	4 paket	70.095.000	4 paket	85.518.300	4 paket	85.518.300	4 paket	85.518.300
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	1000 Map	1000 Map	64.000.000	1000 Map	100.000.000	1000 Map	22.000.400	1000 Map	100.000.000	1000 Map	100.000.000	1000 Map	100.000.000





5	03	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu	55 Dus	55 Dus	33.000.000	55 Dus	50.000.000	55 Dus	20.000.000	55 Dus	50.000.000				
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi ke KORPRI Pusat Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat KORPRI Jumlah Pelaksanaan SKPD	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	245.655.000	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	350.000.000	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	353.761.000	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	350.000.000	4 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Rapat 4 Rapat	350.000.000		
5	03	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Profil SKPD dan Publikasi Layanan Informasi Kepegawaian SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	Rp -	1 Kegiatan	Rp 289.080.000	1 Kegiatan	Rp 75.000.000	1 Kegiatan	Rp 75.000.000
5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	25 Buah	25 Buah	23.984.708	25 Buah	25.000.000	25 Buah	13.040.000	25 Buah	30.000.000	25 Buah	30.000.000	25 Buah	30.000.000
5	03	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor	25 Buah	25 Buah	23.984.708	25 Buah	25.000.000	25 Buah	13.040.000	25 Buah	30.000.000	25 Buah	30.000.000	25 Buah	30.000.000
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Jumlah Pembayaran Lintas Maya Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Pembelian Token Listrik Jumlah Pembayaran Gaji TTK	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang	2.401.215.000	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang	2.401.215.000	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang	1.901.120.000	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang	2.401.215.000	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang	2.401.215.000	650 Lembar 12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan 45 Orang	2.401.215.000
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian Materai	650 Lembar	650 Lembar	6.495.000	650 Lembar	6.495.000	650 Lembar	9.990.000	650 Lembar	6.495.000	650 Lembar	6.495.000	650 Lembar	6.495.000
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Layanan Internet Jumlah Pembelian Air Minum Galon Jumlah Waktu Pembelian Token Listrik	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan	390.000.000	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan	390.000.000	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan	219.330.000	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan	390.000.000	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan	390.000.000	12 Bulan 1000 Liter 12 Bulan	390.000.000
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga Non PNS	45 Orang	45 Orang	2.004.720.000	45 Orang	2.004.720.000	45 Orang	1.671.800.000	45 Orang	2.004.720.000	45 Orang	2.004.720.000	45 Orang	2.004.720.000
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	4 Buah 10000 Liter 6 Kali6 Kali	4 Buah 10000 Liter 6 Kali6 Kali	154.916.800	4 Buah 10000 Liter 6 Kali6 Kali	240.000.000	4 Buah 10000 Liter 6 Kali6 Kali	200.700.000	4 Buah 10000 Liter 6 Kali6 Kali	290.000.000	4 Buah 10000 Liter 6 Kali6 Kali	340.000.000	4 Buah 10000 Liter 6 Kali6 Kali	365.000.000





5	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	124.986.800	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	200.000.000	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	185.630.000	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	250.000.000	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	300.000.000	4 Buah 10000 Liter 6 Kali	325.000.000			
5	03	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 PAKET	1 PAKET	15.070.000									
5	03	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan	6 Kali	6 Kali	29.930.000	6 Kali	40.000.000	6 Kali	-	6 Kali	40.000.000	6 Kali	40.000.000	6 Kali	40.000.000			
5	03	02				Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi		Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi Pegawai	Rp 3.965.858.600		Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi Pegawai	Rp 4.104.602.100		Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi Pegawai	Rp 10.368.501.200		Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi Pegawai	Rp 7.815.550.800	Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi Pegawai	Rp 8.215.688.680	Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi Pegawai	Rp 7.004.328.960
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu Formasi ASN Jumlah SK Pensiun Jumlah Karpag Jumlah Karsi/Karsu Pembinaan Kelembagaan KORPRI Kwalitas System Kwalitas Arsip Data Elektronik Kwalitas Data	1 Dokumen200 Formasi180 Berkas 200 Berkas 45 SK1 Kegiatan	1 Dokumen200 Formasi180 Berkas 200 Berkas 45 SK1 Kegiatan	Rp 72.699.600	1 Dokumen200 Formasi180 Berkas 200 Berkas 45 SK1 Kegiatan	Rp 754.189.900	1 Dokumen200 Formasi180 Berkas 200 Berkas 45 SK1 Kegiatan	Rp 1.926.400.700	1 Dokumen200 Formasi180 Berkas 200 Berkas 45 SK1 Kegiatan	Rp 1.561.000.000	1 Dokumen200 Formasi180 Berkas 200 Berkas 45 SK1 Kegiatan	Rp 1.655.000.000	1 Dokumen200 Formasi180 Berkas 200 Berkas 45 SK1 Kegiatan	Rp 1.715.000.000			
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	72699600	1 Dokumen	92.182.000	1 Dokumen	Rp 23.782.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 175.000.000			
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang Terisi	200 Formasi	200 Formasi	291,454,900	200 Formasi	524.508.800	200 Formasi	Rp 1.000.000.000	200 Formasi	Rp 1.000.000.000	200 Formasi	Rp 1.000.000.000	200 Formasi	Rp 1.000.000.000			
5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Karis/Karsu, Jumlah Karpag, dan Jumlah SK Pensiun	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	235,377,900	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	137.499.100	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	Rp 90.678.200	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	Rp 291.000.000	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	Rp 325.000.000	180 Berkas 200 Berkas 45 SK	Rp 350.000.000			
5	03	02	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							1 KEGIATAN	Rp 541.792.300									
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	149,999,400	1 Kegiatan	149,999,400	1 Kegiatan	Rp 270.148.200	1 Kegiatan	Rp 170.000.000	1 Kegiatan	Rp 180.000.000	1 Kegiatan	Rp 190.000.000			





5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	150000000	1 Dokumen	52.743.600	1 Dokumen	Rp 563.394.600	1 Dokumen	Rp 120.450.000	1 Dokumen	Rp 125.550.000	1 Dokumen	Rp 130.850.300
5	03	02	2	04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	40.054.000	1 Laporan	Rp 122.978.000	1 Laporan	Rp 125.950.000	1 Laporan	Rp 130.650.000	1 Laporan	Rp 135.850.000
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Dokumen Pengajuan ASN Berprestasi, Laporan Kegiatan, Jumlah Piagam dan Sertifikat Penghargaan bagi ASN berprestasi	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	47394100	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	47,394,100	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	Rp 43.300.000	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	Rp 229.203.400	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	80.000.000	20 Dokumen, 1 Laporan, dan 6 Penghargaan	80.000.000
5	03	02	2	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Dokumen Sertifikat dan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya bagi ASN	30 Dokumen	30 Dokumen	107204000	30 Dokumen	107,204,000	30 Dokumen	Rp 60.052.000	30 Dokumen	Rp 36.476.300	30 Dokumen	40.000.000	30 Dokumen	45.000.000
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen Absensi, Laporan Kinerja Bulanan, Dokumen Verifikasi Pengajuan TPP, Laporan Pelaksanaan Sidak Kehadiran Pegawai, Laporan Pelaksanaan Monitoring Absensi dan Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	25900000	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	25,900,000	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	Rp 50.000.000	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	Rp 75.322.800	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	250.000.000	33 Dokumen, 33 Laporan, 33 Dokumen, 1 Laporan, 3 Laporan dan 5 Dokumen	250.000.000
5	03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dokumen Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin, Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Dokumen Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin dan Laporan Pelaksanaan Penyerahan SK Hukuman Disiplin	5 Dokumen	5 Dokumen	60704500	5 Dokumen	60,704,500	5 Dokumen	Rp 179.803.700	4 Dokumen	Rp 74.804.600	3 Dokumen		2 Dokumen	
5	03	02	2	04	09		Dokumen Kelengkapan Izin Perceraian dan Laporan Penyerahan Izin Perceraian	4 Dokumen dan 1 Laporan	4 Dokumen dan 1 Laporan	-	4 Dokumen dan 1 Laporan	-	-	Rp -	4 Dokumen dan 1 Laporan	Rp 45.293.300	3 Dokumen dan 1 Laporan	50.000.000	2 Dokumen dan 1 Laporan	50.000.000
5	04					Pendidikan dan Pelatihan		-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	1.072.235.800		1.500.000.000		1.700.000.000		2.000.000.000
5	04	02				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	ASN yang Menikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural	10,000,000	ASN yang Menikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural	10,000,000	ASN yang Menikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural	1.072.235.800	ASN yang Menikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural	1.500.000.000	ASN yang Menikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural	1.700.000.000	ASN yang Menikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural	2.000.000.000





5	04	02	2	02	Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kelembagaan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS/PNS yang Mengikuti Pengembangan dan peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	10,000,000	10,000,000	1.072.235.800	35 Peserta	35 Peserta	35 Peserta	35 Peserta	50 Peserta	1.500.000.000	75 Peserta	1.700.000.000	100 Peserta	2.000.000.000
5	04	02	2	02	07	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga					1 Kegiatan	84.400								
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Diklat bagi jabatan Fungsional, PKN Tk.II, PKA dan PKP	10,000,000	10,000,000	1.072.235.800	35 Peserta	35 Peserta	35 Peserta	35 Peserta	50 Peserta	1.500.000.000	75 Peserta	1.700.000.000	100 Peserta	2.000.000.000

